

## ABSTRAKSI

Sistem transportasi di Indonesia saat ini didominasi oleh transportasi melalui jalan raya, sedangkan sebuah sistem transportasi yang efisien mengandalkan kereta api. Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke dua puluh pernah mencanangkan moda kereta api sebagai moda transportasi utama di negeri jajahan Indonesia. Sayangnya kebijakan itu tidak berlanjut setelah zaman kemerdekaan dengan makin menyusutnya jaringan kereta api yang beroperasi maupun infrastruktur pendukungnya, seperti stasiun serta sejumlah kereta, gerbong, dan lokomotif.

Semenjak perang dan penjajahan, kondisi infrastruktur yang layak beroperasi jumlahnya semakin menurun. Rendahnya daya operasional infrastruktur yang ada menyebabkan DKA mengalami kerugian. Minimnya pendapatan dan meningkatnya beban operasional menyebabkan daya saing kereta api dengan moda transportasi lain menjadi rendah. Pemerintah ssaat itu juga tidak bisa berbuat banyak dalam membantu DKA. Walaupun keadaan demikian, DKA maupun PNKA tetap berupaya untuk melayani permintaan angkutan masyarakat yang saat itu hanya bisa ditampung dengan kereta api.

DKA kemudian membuat berbagai perencanaan dan kebijakan. Salah satunya adalah dengan mengajukan pinjaman pada pemerintah dan bank dunia untuk merevitalisasi infrastruktur secara bertahap. Revitalisasi ini diharapkan mampu merubah keadaan kereta. Secara bertahap DKA merenovasi diri dalam melayani masyarakat pada saat itu, salah satunya adalah dengan mendatangkan lokomotif, kereta penumpang, sinyal juga jalan dan rel secara periodik dan berkala. Tidak hanya infrastrukturnya, tapi kualitas sumber daya manusia di PNKA juga ditingkatkan yakni dengan melalui tugas belajar dan pelatihan yang dibantu tenaga asing. Semua itu dilakukan PNKA agar bisa melayani masyarakat dengan baik, meningkatkan pendapatan juga daya saing dengan moda transportasi lain.

Kata Kunci : Infrastruktur, Revitalisasi, Implementasi, Kereta Api